

11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00	0,00	0,00	9.691.448.077,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	0,00	0,00	0,00	12.452.810.828,00
	Jumlah	16.319.325.000,00	16.007.608.387,00	98,08	112.366.030.326,00

5.1.1.2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp355.861.049.415,00 dari anggaran sebesar Rp369.026.717.000,00 atau sebesar 96,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp333.646.319.051,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.214.730.364,00 atau 6,66% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 95
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Non Fisik – BOS Reguler	119.877.900.000,00	119.850.182.000,00	99,97	121.099.759.200,00
2	DAK Non Fisik – BOS Kinerja	3.493.000.000,00	3.493.000.000,00	100,00	3.230.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	175.289.265.000,00	172.125.594.400,00	98,19	139.359.816.400,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	877.250.000,00	523.250.000,00	59,64	5.151.595.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reuler	16.717.200.000,00	16.717.200.000,00	100,00	17.232.168.000,00
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Kabupaten/Kota	14.359.832.000,00	12.217.484.172,00	85,08	9.723.844.078,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Puskesmas	22.611.033.000,00	15.449.397.486,00	68,32	23.794.210.658,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-KB	11.371.031.000,00	11.208.138.557,00	98,56	8.810.872.200,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	580.140.000,00	580.140.000,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	415.332.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	1.107.181.000,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	785.962.850,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	247.256.800,00	61,71	235.237.165,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00	100,00	2.655.340.500,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00

17	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	425.106.000,00	425.106.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	369.026.717.000,00	355.861.049.415,00	96,43	333.646.319.051,00

5.1.1.2.1.5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke RKD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp266.452.695.080,00 dari anggaran sebesar Rp269.502.286.000,00 atau 98,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp271.562.076.800,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.109.381.720,00 atau 1,88 % sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 96
Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Desa	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00
	Jumlah	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp76.598.704.794,00 dari anggaran sebesar Rp117.161.741.153,00 atau sebesar 65,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.992.362.685,00 atau 40,89% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 97
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
	Jumlah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00

Pada tahun 2024, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dimana penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang terutang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2028.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Pendapatan bagi Hasil Pajak. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp76.598.704.794,00 dari anggaran sebesar Rp117.161.741.153,00 atau sebesar 65,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.992.362.685,00 atau 40,89% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 98
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
	Jumlah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00

5.1.1.2.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan penerimaan negara atau daerah dari jenis pajak tertentu yang alokasinya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau antar daerah penghasil dan non-penghasil. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp76.598.704.794,00 dari anggaran sebesar Rp117.161.741.153,00 atau sebesar 65,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.992.362.685,00 atau 40,89% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 99
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.045.206.704,00	722.063.627,00	11,94	27.647.645.097,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.960.973.122,00	4.239.288.924,00	107,02	12.213.220.547,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.356.231.372,00	23.885.767.523,00	41,64	48.508.787.704,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	700.262.284,00	73.076.784,00	10,43	286.318.395,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	49.099.067.671,00	47.678.507.936,00	97,10	40.935.095.736,00
	Jumlah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 tidak dianggarkan, Sedangkan Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp72.433.674,76, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 100
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	72.433.674,76
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	72.433.674,76

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 dari anggaran sebesar Rp2.452.178.542.542,00 atau 93,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.309.190.574.317,60 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.117.319.164,59 atau 0,35%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 101
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.669.739.476.000,12	1.561.242.265.905,34	93,50	1.582.938.466.132,90
2	Belanja Modal	290.014.128.670,88	260.314.334.265,67	89,75	320.800.571.557,70
3	Belanja Tidak Terduga	18.370.523.232,00	17.111.242.762,00	93,15	4.913.057.922,00
4	Belanja Transfer	474.054.414.639,00	462.405.412.220,00	97,54	400.538.478.705,00
	Jumlah	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	93,83	2.309.190.574.317,60

Secara rinci masing-masing jenis belanja dalam LRA Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.561.242.265.905,34 dari anggaran sebesar Rp1.669.739.476.000,12 atau 93,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.582.938.466.132,90 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.696.200.227,56 atau 1,37% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 102
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	933.435.713.189,93	876.721.749.917,57	93,92	877.743.801.240,51
2	Belanja Barang dan Jasa	511.739.651.712,59	471.606.199.365,57	92,15	461.577.506.441,49
3	Belanja Hibah	220.207.815.097,60	208.999.616.622,20	94,91	241.174.866.230,90
4	Belanja Bantuan Sosial	4.356.296.000,00	3.914.700.000,00	89,86	2.442.292.220,00
	Jumlah	1.669.739.476.000,12	1.561.242.265.905,34	93,50	1.582.938.466.132,90

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 876.721.749.917,57 dari anggaran sebesar Rp933.435.713.189,93 atau sebesar 93,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp877.743.801.240,51 maka realisasi Tahun Anggaran 2025

mengalami penurunan sebesar Rp1.022.051.322,94 atau 0,12% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 103
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	597.823.572.654,58	564.870.194.094,00	94,48	578.225.104.786,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	274.839.665.470,00	255.084.996.390,00	92,81	80.264.934.093,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	162.853.343.422,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.667.638.480,00	28.351.488.494,00	98,89	28.025.096.410,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.545.267.470,00	1.182.109.188,00	76,49	174.819.199,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	810.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	29.566.449.115,35	26.239.841.751,57	88,74	27.390.503.330,51
	Jumlah	933.435.713.189,93	876.721.749.917,57	93,92	877.743.801.240,51

5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp564.870.194.094,00 dari anggaran sebesar Rp597.823.572.654,58 atau sebesar 94,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp578.225.104.786,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.354.910.692,00 atau 2,31% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 104
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	441.978.270.296,58	433.804.521.285,00	98,15	441.904.469.303,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.276.076.423,00	38.943.326.866,00	96,69	40.646.290.992,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.304.962.750,00	4.945.425.000,00	93,22	5.356.524.286,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.168.323.113,00	26.725.259.160,00	94,87	28.421.675.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.350.278.055,00	7.088.879.106,00	96,44	6.796.098.700,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.525.433.406,00	21.170.362.445,00	93,98	22.325.384.742,00
7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	11.771.291.060,00	3.306.252.259,00	28,08	998.235.076,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.950.000,01	5.230.481,00	20,96	5.731.594,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	33.567.039.382,99	25.520.483.801,00	76,02	28.248.696.777,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.066.578.361,00	840.116.150,00	78,76	880.501.999,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.199.735.081,00	2.520.337.541,00	78,76	2.641.496.317,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.590.634.726,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	597.823.572.654,58	564.870.194.094,00	94,48	578.225.104.786,00

5.1.2.1.1.1.1. Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2025 sebesar Rp433.804.521.285,00 dari anggaran sebesar Rp441.978.270.296,58 atau sebesar 98,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp441.904.469.303,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.099.948.018,00 atau 1,83% sebagaimana terlihat pada

rincian di bawah ini:

Tabel 105
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	358.020.002.040,58	350.869.356.967,00	98,00	368.182.899.448,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	83.958.268.256,00	82.935.164.318,00	98,78	73.721.569.855,00
	Jumlah	441.978.270.296,58	433.804.521.285,00	98,15	441.904.469.303,00

5.1.2.1.1.1.2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2025 sebesar Rp38.943.326.866,00 dari anggaran sebesar Rp40.276.076.423,00 atau sebesar 96,69%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.646.290.992,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.702.964.126,00 atau 4,19% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.719.140.116,00	30.763.271.451,00	96,98	33.242.918.628,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.556.936.307,00	8.180.055.415,00	95,59	7.403.372.364,00
	Jumlah	40.276.076.423,00	38.943.326.866,00	96,69	40.646.290.992,00

5.1.2.1.1.1.3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2025 sebesar Rp4.945.425.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.304.962.750,00 atau sebesar 93,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.356.524.286,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp411.099.286,00 atau 7,67% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 107
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.304.962.750,00	4.945.425.000,00	93,22	5.356.524.286,00
	Jumlah	5.304.962.750,00	4.945.425.000,00	93,22	5.356.524.286,00

5.1.2.1.1.1.4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2025 sebesar Rp26.725.259.160,00 dari anggaran sebesar Rp28.168.323.113,00 atau sebesar 94,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.411.465.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.696.415.840,00 atau 5,97% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 108
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.168.323.113,00	26.725.259.160,00	94,87	28.411.465.000,00

2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00
	Jumlah	28.168.323.113,00	26.725.259.160,00	94,87	28.421.675.000,00

5.1.2.1.1.5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2025 sebesar Rp7.088.879.106,00 dari anggaran sebesar Rp7.350.278.055,00 atau sebesar 96,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.796.098.700,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp292.780.406,00 atau 4,31% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 109
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.704.622.847,00	2.543.210.000,00	94,03	2.634.933.700,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.645.655.208,00	4.545.669.106,00	97,84	4.161.165.000,00
	Jumlah	7.350.278.055,00	7.088.879.106,00	96,44	6.796.098.700,00

5.1.2.1.1.6. Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun 2025 sebesar Rp21.170.362.445,00 dari anggaran sebesar Rp22.525.433.406,00 atau sebesar 93,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.325.384.742,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.155.022.297,00 atau 5,17% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 110
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.154.755.407,00	16.233.352.240,00	94,62	17.496.419.142,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.370.677.999,00	4.937.010.205,00	91,92	4.828.965.600,00
	Jumlah	22.525.433.406,00	21.170.362.445,00	93,98	22.325.384.742,00

5.1.2.1.1.7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Pada Tahun 2025 Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN adalah sebesar Rp3.306.252.259,00 dari anggaran sebesar Rp11.771.291.060,00 atau sebesar 28,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp998.235.076,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.308.017.183,00 atau 231,21% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 111
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.771.291.060,00	3.306.252.259,00	28,08	998.235.076,00
	Jumlah	11.771.291.060,00	3.306.252.259,00	28,08	998.235.076,00

Kenaikan realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar 231,21% disebabkan karena berlakunya TER (Tarif Efektif Rata-rata) yaitu metode perhitungan pemotongan PPh pasal

21 terbaru yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan (bulan Januari s.d. bulan November), sementara di bulan Desember perhitungan pajaknya menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh sehingga mengakibatkan besarnya nilai pajak di bulan Desember. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum menerapkan metode perhitungan ini, Metode TER baru diterapkan pada Tahun 2025, sehingga mengakibatkan kenaikan realisasi yang signifikan.

5.1.2.1.1.1.8. Belanja Pembulatan Gaji ASN

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Pembulatan gaji ASN adalah sebesar Rp5.230.481,00 dari anggaran sebesar Rp24.950.000,01 atau sebesar 20,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.731.594,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp501.113,00 atau 8,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 112
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.400.000,01	3.924.703,00	25,48	4.421.753,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.550.000,00	1.305.778,00	13,67	1.309.841,00
	Jumlah	24.950.000,01	5.230.481,00	20,96	5.731.594,00

5.1.2.1.1.1.9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Pada Tahun 2025 Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah sebesar Rp25.520.483.801,00 dari anggaran sebesar Rp33.567.039.382,99 atau sebesar 76,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.248.696.777,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.728.212.976,00 atau 9,66% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 113
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.091.639.163,99	21.211.363.260,00	72,91	25.315.178.970,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.475.400.219,00	4.309.120.541,00	96,28	2.933.517.807,00
	Jumlah	33.567.039.382,99	25.520.483.801,00	76,02	28.248.696.777,00

5.1.2.1.1.1.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN adalah sebesar Rp840.116.150,00 dari anggaran sebesar Rp1.066.578.361,00 atau sebesar 78,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp880.501.999,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.385.849,00 atau 4,59% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 114
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	873.032.617,00	672.812.430,00	77,06	729.820.665,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	193.545.744,00	167.303.720,00	86,44	150.681.334,00
	Jumlah	1.066.578.361,00	840.116.150,00	78,76	880.501.999,00

5.1.2.1.1.1.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN adalah sebesar Rp2.520.337.541,00 dari anggaran sebesar Rp3.199.735.081,00 atau sebesar 78,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.641.496.317,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp121.158.776,00 atau 4,59% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 115
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.619.097.855,00	2.018.443.425,00	77,06	2.189.465.900,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	580.637.226,00	501.894.116,00	86,43	452.030.417,00
	Jumlah	3.199.735.081,00	2.520.337.541,00	78,76	2.641.496.317,00

5.1.2.1.1.1.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Pada Tahun 2025, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terdapat realisasi dari anggaran sebesar Rp2.590.634.726,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 116
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.124.401.462,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	466.233.264,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.590.634.726,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terealisasi karena belum diterbitkannya regulasi teknis yang mengatur pemungutan iuran dari peserta, meskipun PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah diterbitkan. Alasan utama mengapa program Tapera belum dilaksanakan secara penuh khususnya dalam hal pemungutan iuran baru bagi PNS aktif pasca transisi dari Bapertarum adalah karena pemerintah masih fokus pada perbaikan tata kelola, pembenahan regulasi teknis, dan upaya membangun kepercayaan publik sehingga pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi penuh Peraturan Pemerintah tersebut hingga Tahun 2027.

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 sebesar Rp255.084.996.390,00 dari anggaran sebesar Rp274.839.665.470,00 atau sebesar 92,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.264.934.093,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp174.820.062.297,00 atau 217,80% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 117
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	45.907.457.987,00	39.212.896.466,44	85,41	43.340.942.337,50

2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.626.948.548,00	31.727.614.833,56	89,05	35.479.211.755,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.474.946.400,00	1.278.703.600,00	86,69	1.444.780.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.830.312.535,00	182.865.781.490,00	95,32	0,00
	Jumlah	274.839.665.470,00	255.084.996.390,00	92,81	80.264.934.093,00

5.1.2.1.1.2.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2025 sebesar Rp39.212.896.466,44 dari anggaran sebesar Rp45.907.457.987,00 atau sebesar 85,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.340.942.337,50 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.128.045.871,06 atau -9,52% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 118
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.481.244.237,00	38.474.921.916,44	86,49	42.897.781.327,50
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.426.213.750,00	737.974.550,00	51,74	443.161.010,00
	Jumlah	45.907.457.987,00	39.212.896.466,44	85,41	43.340.942.337,50

5.1.2.1.1.2.2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun 2025 sebesar Rp31.727.614.833,56 dari anggaran sebesar Rp35.626.948.548,00 atau sebesar 89,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.479.211.755,50 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.751.596.921,94 atau 10,57% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 119
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.361.933.548,00	31.552.482.408,56	89,22	35.321.669.165,50
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	265.015.000,00	175.132.425,00	66,08	157.542.590,00
	Jumlah	35.626.948.548,00	31.727.614.833,56	89,05	35.479.211.755,50

5.1.2.1.1.2.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelengkapan Profesi ASN Tahun 2025 sebesar Rp1.278.703.600,00 dari anggaran sebesar Rp1.474.946.400,00 atau sebesar 86,69%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.444.780.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp166.076.400,00 atau 11,49% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 120
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.474.946.400,00	1.278.703.600,00	86,69	1.444.780.000,00
	Jumlah	1.474.946.400,00	1.278.703.600,00	86,69	1.444.780.000,00

5.1.2.1.1.2.4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN terdiri dari Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dan Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 sebesar Rp182.865.781.490,00 dari anggaran sebesar Rp191.830.312.535,00 atau sebesar 95,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.853.343.422,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.012.438.068,00 atau 12,29% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 121
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	63.750.000,00	62.062.500,00	97,35	51.945.000,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	41.625.000,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.375.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	993.750.000,00	944.062.500,00	95,00	1.206.453.750,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	187.500.000,00	187.500.000,00	100,00	235.927.500,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.866.569.525,00	1.786.406.250,00	95,70	2.262.818.750,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.299.862.500,00	1.097.550.667,00	84,43	0,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.074.862.500,00	705.824.333,00	65,66	0,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	117.450.750,00	97.348.383,00	82,88	0,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.650.000,00	20.542.500,00	45,00	30.160.513,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	4.366.257,00

12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	28.873.625,00	28.873.625,00	100,00	74.411.617,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.810.000,00	0,00	0,00	2.383.250,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/Pertokoan	55.865.225,00	21.655.219,00	38,76	36.322.285,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.174.325,00	311.250,00	2,19	4.777.431,00
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	68.226.000,00	0,00	0,00	12.844.350,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.112.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	1.334.991,00
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	41.715.000,00
21	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	179.394.529.830,00	172.144.816.000,00	95,95	142.470.620.900,00
22	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.114.000.371,00	2.754.750.000,00	88,46	3.185.000.000,00
23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	3.348.300.384,00	2.979.928.263,00	88,99	3.385.774.828,00
24	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	9.105.412.000,00
25	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	124.640.000,00
26	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	574.810.000,00
	Jumlah	191.830.312.535,00	182.865.781.490,00	95,32	162.853.343.422,00

5.1.2.1.1.3. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp28.351.488.494,00 dari anggaran sebesar Rp28.667.638.480,00 atau sebesar 98,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.025.096.410,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp326.392.084,00 atau 1,16% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 122
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00

2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	119.217.000,00	116.214.000,00	97,48	117.138.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	157.151.400,00	134.121.840,00	85,34	131.225.040,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.340.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.613.241.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.077.800,00	131.330.850,00	85,79	108.310.650,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.675.550,00	18.102.525,00	87,55	15.331.575,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,66	6.300.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.182.653.274,00	98,98	1.008.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	591.461.754,00	517.332.133,00	87,46	390.000.457,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.861.091.976,00	5.771.003.872,00	98,46	8.225.284.688,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.893.600.000,00	7.865.000.000,00	99,63	8.452.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	456.645.000,00
	Jumlah	28.667.638.480,00	28.351.488.494,00	98,89	28.025.096.410,00

5.1.2.1.1.3.1. Belanja Uang Representasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun 2025 sebesar Rp1.114.260.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.114.260.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.112.580.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.680.000,00 atau 0,15% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 123
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00
	Jumlah	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00

5.1.2.1.1.3.2. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Tahun 2025 sebesar Rp116.214.000,00 dari anggaran sebesar Rp119.217.000,00 atau sebesar 97,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.138.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp924.000,00 atau 0,79% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 124
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	119.217.000,00	116.214.000,00	97,48	117.138.000,00
	Jumlah	119.217.000,00	116.214.000,00	97,48	117.138.000,00

5.1.2.1.1.3.3. Belanja Tunjangan Beras DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD Tahun 2025 sebesar Rp134.121.840,00 dari anggaran sebesar Rp157.151.400,00 atau sebesar 85,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp131.225.040,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.896.800,00 atau 2,21% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 125
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	157.151.400,00	134.121.840,00	85,34	131.225.040,00
	Jumlah	157.151.400,00	134.121.840,00	85,34	131.225.040,00

5.1.2.1.1.3.4. Belanja Uang Paket DPRD

Realisasi Belanja Uang Paket DPRD Tahun 2025 sebesar Rp95.193.000,00 dari anggaran sebesar Rp111.426.000,00 atau sebesar 85,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.340.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp147.000,00 atau 0,15 % sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 126
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Paket DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.340.000,00
	Jumlah	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.340.000,00

5.1.2.1.1.3.5. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp1.615.677.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.615.677.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.613.241.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.436.000,00 atau 0,15% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 127
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.613.241.000,00
	Jumlah	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.613.241.000,00

5.1.2.1.1.3.6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp131.330.850,00 dari anggaran sebesar Rp153.077.800,00 atau sebesar 85,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.310.650,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.020.200,00 atau 21,25% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 128
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.077.800,00	131.330.850,00	85,79	108.310.650,00
	Jumlah	153.077.800,00	131.330.850,00	85,79	108.310.650,00

5.1.2.1.1.3.7. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Tahun 2025 sebesar Rp18.102.525,00 dari anggaran sebesar Rp20.675.550,00 atau sebesar 87,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.331.575,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.770.950,00 atau 18,07% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 129
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.675.550,00	18.102.525,00	87,55	15.331.575,00
	Jumlah	20.675.550,00	18.102.525,00	87,55	15.331.575,00

5.1.2.1.1.3.8. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 sebesar Rp8.790.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp8.820.000.000,00 atau sebesar 99,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.300.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.490.600.000,00 atau 39,53% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 130
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,66	6.300.000.000,00
	Jumlah	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,66	6.300.000.000,00

5.1.2.1.1.3.9. Belanja Tunjangan Reses DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun 2025 sebesar Rp2.182.653.274,00 dari anggaran sebesar Rp2.205.000.000,00 atau sebesar 98,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.008.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.653.274,00 atau 116,53% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 131
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.182.653.274,00	98,98	1.008.000.000,00
	Jumlah	2.205.000.000,00	2.182.653.274,00	98,98	1.008.000.000,00

Kenaikan Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun 2025 sebesar 116,53% disebabkan oleh hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur yang mengalami kenaikan dari kategori sedang (Tahun 2024) menjadi kategori tinggi, sehingga mempengaruhi besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan tinggi apabila diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah). Perhitungan tersebut didasarkan pada besaran pendapatan umum daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dikurangi dengan belanja pegawai ASN yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN. Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa data yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Ini berarti bahwa perhitungan anggaran Tahun 2025 berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023. Dari Hasil perhitungan tersebut diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah Rp560.645.125.659,71.

5.1.2.1.1.3.10. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 sebesar Rp517.332.133,00 dari anggaran sebesar Rp591.461.754,00 atau sebesar 87,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp390.000.457,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp127.331.676,00 atau 32,65% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 132
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	591.461.754,00	517.332.133,00	87,46	390.000.457,00
	Jumlah	591.461.754,00	517.332.133,00	87,46	390.000.457,00

5.1.2.1.1.3.11. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 sebesar Rp5.771.003.872,00 dari anggaran sebesar Rp5.861.091.976,00 atau sebesar 98,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.225.284.688,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.454.280.816,00 atau 29,84% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 133
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	121.716.294,00	96.931.872,00	79,63	96.148.176,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	25.000.000,00	2.268.000,00	9,07	2.284.128,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	28.775.682,00	6.804.000,00	23,64	6.852.384,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.685.600.000,00	5.665.000.000,00	99,63	8.120.000.000,00
	Jumlah	5.861.091.976,00	5.771.003.872,00	98,46	8.225.284.688,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa penurunan signifikan terhadap Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdapat pada Tunjangan Perumahan DPRD. Penurunan tersebut sebut sebagai tindak lanjut hasil temuan BPK yang merekomendasikan agar melakukan survei ulang terhadap besaran tunjangan perumahan DPRD.

5.1.2.1.1.3.12. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Tahun 2025 sebesar Rp7.865.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.893.600.000,00 atau sebesar 99,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.452.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp587.000.000,00 atau 6,95% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 134
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.893.600.000,00	7.865.000.000,00	99,63	8.452.000.000,00
	Jumlah	7.893.600.000,00	7.865.000.000,00	99,63	8.452.000.000,00

5.1.2.1.1.3.13. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 atau sebesar 0,00%. Tidak terealisasinya belanja tersebut dikarenakan tidak adanya pergantian anggota DPRD selama Tahun 2025. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp456.645.000,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 135
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	456.645.000,00
	Jumlah	5.000.000,00	0,00	0,00	456.645.000,00

5.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp1.182.109.188,00 dari anggaran sebesar Rp1.545.267.470,00 atau sebesar 76,49%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.819.199,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.007.289.989,00 atau 576,19% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 136
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	55.111.546,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.468.900,00	4.374.000,00	97,87	7.644.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.791.518,00	5.648.760,00	97,53	7.719.972,00

5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	17.674.256,00	539.551,00	3,05	230.159,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.180,00	23,60	1.040,00
7	Belanja Iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.436.836,00	5.384.640,00	83,65	5.392.296,00
8	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	110.046,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	330.140,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.296.896.000,00	980.878.851,00	75,63	0,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	56.755.696,00	31.952.926,00	56,29	0,00
Jumlah		1.545.267.470,00	1.182.109.188,00	76,49	174.819.199,00

Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 576,19% disebabkan adanya realisasi Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH yang baru direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Penerimaan insentif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.2.1.1.4.1. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH adalah sebesar Rp54.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp55.965.000,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.111.546,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp511.546,00 atau 0,93%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 137
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	55.111.546,00
Jumlah		55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	55.111.546,00

5.1.2.1.1.4.2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH adalah sebesar Rp4.374.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.468.900,00 atau sebesar 97,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.644.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.270.000,00 atau 42,78% sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 138
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.468.900,00	4.374.000,00	97,87	7.644.000,00
Jumlah		4.468.900,00	4.374.000,00	97,87	7.644.000,00

5.1.2.1.1.4.3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH adalah sebesar

Rp98.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.737.000,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.280.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 masih tetap sebesar Rp98.280.000,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 139
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
	Jumlah	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00

5.1.2.1.1.4.4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH adalah sebesar Rp5.648.760,00 dari anggaran sebesar Rp5.791.518,00 atau sebesar 97,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.719.972,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.071.212,00 atau 26,83%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 140
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.791.518,00	5.648.760,00	97,53	7.719.972,00
	Jumlah	5.791.518,00	5.648.760,00	97,53	7.719.972,00

5.1.2.1.1.4.5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH adalah sebesar Rp539.551,00 dari anggaran sebesar Rp17.674.256,00 atau sebesar 3,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp230.159,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp309.392,00 atau 134,43%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 141
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	17.674.256,00	539.551,00	3,05	230.159,00
	Jumlah	17.674.256,00	539.551,00	3,05	230.159,00

5.1.2.1.1.4.6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH adalah sebesar Rp1.180,00 dari anggaran sebesar Rp5.000,00 atau sebesar 23,60%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.040,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp140,00 atau 13,46%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 142
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.180,00	23,60	1.040,00
	Jumlah	5.000,00	1.180,00	23,60	1.040,00

5.1.2.1.1.4.7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH adalah sebesar Rp5.384.640,00 dari anggaran sebesar Rp6.436.836,00 atau sebesar 83,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.392.296,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.656,00 atau 0,14%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 143
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.436.836,00	5.384.640,00	83,65	5.392.296,00
	Jumlah	6.436.836,00	5.384.640,00	83,65	5.392.296,00

5.1.2.1.1.4.8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH adalah sebesar Rp112.320,00 dari anggaran sebesar Rp134.316,00 atau sebesar 83,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.046,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.274,00 atau 2,07%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 144
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	110.046,00
	Jumlah	134.316,00	112.320,00	83,62	110.046,00

5.1.2.1.1.4.9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH adalah sebesar Rp336.960,00 dari anggaran sebesar Rp402.948,00 atau sebesar 83,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330.140,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.820,00 atau 2,07%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 145
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	330.140,00
	Jumlah	402.948,00	336.960,00	83,62	330.140,00

5.1.2.1.1.4.10. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah adalah sebesar Rp980.878.851,00 dari anggaran sebesar Rp1.296.896.000,00 atau sebesar 75,63%. Sedangkan pada Tahun 2024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah tidak dianggarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 146
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	225.250.000,00	213.987.500,00	95,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	425.425.000,00	296.926.351,00	69,79	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	294.635.500,00	248.778.150,00	84,43	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	243.635.500,00	159.986.850,00	65,66	0,00
	Jumlah	1.296.896.000,00	980.878.851,00	75,63	0,00

5.1.2.1.1.4.11. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi bagi KDH/WKDH adalah sebesar Rp31.952.926,00 dari anggaran sebesar Rp56.755.696,00 atau sebesar 56,29%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 147
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	12.080.546,00	327.250,00	2,70	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.350.000,00	4.207.500,00	45,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00

4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Pasar	11.442.275,00	11.442.275,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.507.500,00	466.438,00	18,60	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.913.875,00	1.301.713,00	22,01	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	425.000,00	63.750,00	15,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	850.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Peretujuan Bangunan Gedung	13.294.000,00	13.294.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	56.755.696,00	31.952.926,00	56,29	0,00

5.1.2.1.1.5. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp993.120.000,00 dari anggaran sebesar Rp993.120.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp810.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp183.120.000,00 atau 22,61%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 148
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	210.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	810.000.000,00

5.1.2.1.1.5.1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah sebesar Rp393.120.000,00 dari anggaran sebesar Rp393.120.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp210.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp183.120.000,00 atau 87,20%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 149
Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	210.000.000,00
	Jumlah	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	210.000.000,00

Kenaikan realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2025 sebesar 87,20% disebabkan oleh hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur yang mengalami kenaikan dari kategori sedang (Tahun 2024) menjadi kategori tinggi, sehingga mempengaruhi besaran dana operasional pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan tinggi apabila diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah). Perhitungan tersebut didasarkan pada besaran pendapatan umum daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dikurangi dengan belanja pegawai ASN yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN. Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa Data yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Ini berarti bahwa perhitungan anggaran Tahun 2025 berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023. Dari Hasil perhitungan tersebut diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah Rp560.645.125.659,71.

5.1.2.1.1.5.2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Dana Operasional KDH/WKDH adalah sebesar Rp600.000.000,00 dari anggaran sebesar 600.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 150
Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00

5.1.2.1.1.6. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 sebesar Rp26.239.841.751,57 dari anggaran sebesar Rp29.566.449.115,35 atau sebesar 88,74%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.390.503.330,50 maka Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.150.661.578,93 atau 4,20%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 151
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	29.566.449.115,35	26.239.841.751,57	88,74	27.390.503.330,50
	Jumlah	29.566.449.115,35	26.239.841.751,57	88,74	27.390.503.330,50

Belanja Pegawai BLUD terealisasi pada RSUD KH. Ahmad Hanafiah sebesar Rp257.040.000,00 dan Puskesmas-puskesmas sebesar Rp25.982.801.751,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152
Rincian Realisasi Belanja Pegawai BLUD
Tahun Anggaran 2025

No.	Nama BLUD	Realisasi
1	Puskesmas Rejo Katon	318.055.470,10
2	Puskesmas Sidorejo	557.922.763,00
3	Puskesmas Bumi Emas	569.243.223,14
4	Puskesmas Karya Tani	487.146.477,00
5	Puskesmas Pakuan Aji	441.272.871,00
6	Puskesmas Adirejo	494.563.360,00
7	Puskesmas Batanghari	968.574.615,00
8	Puskesmas Sekampung	857.071.106,40
9	Puskesmas Trimulyo	715.543.009,00
10	Puskesmas Jabung	717.799.344,00
11	Puskesmas Pasir Sakti	1.319.100.398,00
12	Puskesmas Pugung Raharjo	959.595.146,00
13	Puskesmas Peniangan	595.823.733,00
14	Puskesmas Sumber Rejo	966.346.186,14
15	Puskesmas Labuhan Maringgai	1.547.061.475,00
16	Puskesmas Sribawono	1.156.052.918,00
17	Puskesmas Way Mili	776.655.319,00
18	Puskesmas Wana	572.534.457,00
19	Puskesmas Mataran Baru	785.247.815,00
20	Puskesmas Way Jepara	1.490.846.483,00
21	Puskesmas Rajabasa Lama	757.873.952,00
22	Puskesmas Brajo Harjo Sari	688.652.315,00
23	Puskesmas Braja Caka	348.235.886,00
24	Puskesmas Sukadana	1.108.965.038,00
25	Puskesmas Sukaraja Nuban	827.616.249,00
26	Puskesmas Sukaraja Tiga	454.678.941,00
27	Puskesmas Donomulyo	411.653.637,00
28	Puskesmas Tanjung Harapan	410.511.460,00
29	Puskesmas Pekalongan	1.118.098.419,00
30	Puskesmas Ganti Warno	472.378.691,00
31	Puskesmas Raman Utra	483.244.365,00
32	Puskesmas Purbolinggo	1.190.488.587,78
33	Puskesmas Tambah Subur	755.987.372,00
34	Puskesmas Margototo	657.960.670,01
35	RSUD KH. Ahmad Hanafiah	257.040.000,00
	JUMLAH	26.239.841.751,57

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang/jasa habis pakai guna operasional. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp471.606.199.365,57 dari anggaran sebesar Rp511.739.651.712,59 atau sebesar 92,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp461.577.506.441,49 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.028.692.924,08 atau 2,17%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 153
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	77.047.352.419,03	70.673.333.278,00	91,72	71.010.575.354,00
2	Belanja Jasa	206.796.878.373,62	185.683.822.505,60	89,79	178.657.423.132,73
3	Belanja Pemeliharaan	15.517.804.489,29	13.320.328.980,78	85,83	12.722.221.614,06
4	Belanja Perjalanan Dinas	42.408.065.840,00	32.301.296.140,00	76,16	30.492.462.786,00

5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.252.210.400,00	2.748.048.830,00	84,49	2.847.648.996,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	79.965.200.662,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	75.583.050.000,00	78.555.964.429,00	103,93	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.144.303.000,00	16.598.672.726,00	86,70	19.012.644.259,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.989.987.190,65	71.724.732.476,19	99,63	66.869.329.637,70
	Jumlah	511.739.651.712,59	471.606.199.365,57	92,15	461.577.506.441,49

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp471.606.199.365,57 terdapat realisasi belanja yang bersumber dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp304.726.829.734,38 dan transaksi non anggaran sebesar Rp166.879.369.631,19 antara lain Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Lebih lanjut terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sebesar Rp682.671.592,75, namun masih dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.673.333.278,00 dari anggaran sebesar Rp77.047.352.419,03 atau sebesar 91,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.010.575.354,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp337.242.076,00 atau 0,47%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 154
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	76.784.380.401,86	70.427.881.778,00	91,72	70.568.145.979,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	262.972.017,17	245.451.500,00	93,33	442.429.375,00
	Jumlah	77.047.352.419,03	70.673.333.278,00	91,72	71.010.575.354,00

5.1.2.1.2.1.1. Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.427.881.778,00 dari anggaran sebesar Rp76.784.380.401,86 atau sebesar 91,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.568.145.979,00 maka realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp140.264.201,00 atau 0,20%. Realisasi belanja barang pakai habis dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 155
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi	196.798.081,00	107.436.000,00	54,59	445.894.605,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	172.932.684,00	169.014.350,00	97,73	47.687.770,00

3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	689.485.440,00	488.011.829,00	70,77	1.213.215.256,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.696.581,00	8.590.190,00	80,30	3.292.800,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	43.323.690,00	41.328.536,00	95,39	25.729.160,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	238.720.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.095.131.087,23	10.392.470.576,00	93,66	10.437.523.521,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	12.173.648,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lain nya	45.966.370,00	43.741.000,00	95,15	4.500.000,00
10	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.137.832.623,47	4.580.330.499,00	89,14	4.951.599.947,00
11	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.748.600.087,00	3.549.702.270,00	94,69	4.223.732.334,00
12	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.774.580.902,50	10.926.392.702,00	92,79	11.879.092.374,00
13	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	508.086.200,00	478.066.370,00	94,09	558.481.770,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	19.522.056,00
15	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.320.654.202,50	3.061.910.004,00	92,20	3.286.102.738,00
16	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor	932.779.168,03	856.251.241,00	91,79	1.059.640.244,00
17	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.532.832.703,58	1.478.263.882,00	96,44	1.158.151.736,00
18	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.921.950.250,00	1.791.534.515,00	93,21	1.481.647.308,00
19	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kaporlap Perlengkapan Satwa	38.721.240,00	31.080.000,00	80,26	0,00
20	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	59.547.557,20	58.134.315,00	97,62	35.650.500,00
21	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	384.385.000,00	378.370.000,00	98,43	334.848.475,00
22	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	868.245.917,50	803.301.976,00	92,52	1.415.930.162,00
23	Belanja Obat-obatan-Obat	6.337.304.396,45	6.126.000.636,00	96,66	2.704.435.462,00
24	Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.758.720.745,40	2.198.872.103,00	79,70	1.025.144.950,00
25	Belanja Persediaan untuk Strategis/Berjaga-jaga-Perseediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	132.700.950,00	106.963.981,00	80,60	0,00

26	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	53.590.200,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Natura	2.426.436.197,00	2.266.801.630,00	93,42	1.298.628.727,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	115.690.000,00	106.189.457,00	91,78	92.782.696,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.257.185.900,00	12.751.381.740,00	89,43	12.372.085.528,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.160.880.000,00	3.091.868.205,00	97,81	3.285.830.181,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan	567.000,00	556.600,00	98,16	6.655.700,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00
33	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	2.773.879.800,00	2.552.922.880,00	92,03	3.452.539.000,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	174.532.500,00	173.950.000,00	99,66	125.375.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	517.500.000,00	504.772.500,00	97,54	566.400.000,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.218.000,00	4.210.000,00	99,81	129.150.000,00
37	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.322.000,00	11.265.000,00	99,49	254.850.000,00
38	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	153.416.500,00	150.698.800,00	98,22	262.084.500,00
39	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	80.031.000,00	78.316.050,00	97,85	55.767.230,00
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	53.280.000,00	53.000.000,00	99,47	52.700.000,00
41	Belanja Pakaian Penyelamatan	159.904.800,00	148.830.241,00	93,07	0,00
42	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	164.616.800,00	70.244.000,00	42,67	28.724.000,00
43	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	67.080.000,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	550.500.000,00	482.174.000,00	87,58	917.826.700,00
45	Belanja Pakaian Olahraga	392.261.828,00	284.729.700,00	72,58	813.889.901,00
46	Belanja Pakaian Paskibraka	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00	8.060.000,00
47	Belanja Bareng Sampel Pangan	4.740.000,00	1.652.000,00	34,85	0,00
	Jumlah	76.784.380.401,86	70.427.881.778,00	91,72	70.568.145.979,00

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp70.427.881.778,00 terdapat belanja Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor yang menjadi aset sebesar Rp6.730.500,00.

5.1.2.1.2.1.2. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp245.451.500,00 dari anggaran sebesar Rp262.972.017,17 atau sebesar 93,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp442.429.375,00 maka realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria

Kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp196.977.875,00 atau 44,52%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 156
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	3.507.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	396.921.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Mebel	0,00	0,00	0,00	32.901.375,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	213.710.401,00	196.816.500,00	92,09	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.883.442,00	7.685.000,00	97,48	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	41.157.334,80	40.950.000,00	99,49	0,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya	220.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	839,37	0,00	0,00	0,00
Jumlah		262.972.017,17	245.451.500,00	93,33	442.429.375,00

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp254.451.500,00 terdapat Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yang menjadi aset sebesar Rp9.075.000,00.

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp185.683.822.505,60 dari anggaran sebesar Rp206.796.878.373,62 atau sebesar 89,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp178.657.423.132,73 maka realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.026.399.372,87 atau 3,93%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 157
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	141.379.503.201,00	127.456.647.565,00	90,15	114.292.161.943,73
2	Belanja Iuran dan Jaminan Asuransi	39.433.358.160,00	36.567.966.379,00	92,73	34.749.336.661,00
3	Belanja Sewa Tanah	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	15.500.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.693.197.341,62	3.521.748.087,00	95,35	3.399.543.160,00

5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	181.300.000,00	142.500.000,00	78,59	698.472.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	117.278.277,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.083.623.155,00	6.224.621.756,60	68,52	7.196.371.868,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.376.195.896,00	1.237.772.470,00	89,94	1.323.376.129,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	7.143.720.000,00	6.542.512.870,00	91,58	4.461.412.500,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.890.896.620,00	3.464.623.378,00	89,04	11.075.184.441,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	600.084.000,00	513.430.000,00	85,55	1.299.942.510,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00	28.843.643,00
	Jumlah	206.796.878.373,62	185.683.822.505,60	89,79	178.657.423.132,73

5.1.2.1.2.2.1. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp127.456.647.565,00 dari anggaran sebesar Rp141.379.503.201,00 atau sebesar 90,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.292.161.943,73 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.164.485.621,27 atau 11,52%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 158
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Honorium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	3.839.411.000,00	2.295.870.000,00	59,79	3.590.907.500,00
2	Honorium tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	634.252.000,00	416.550.000,00	65,67	2.846.435.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	52.200.000,00	46.800.000,00	89,65	100.800.000,00
4	Honorium penyuluhan atau pendampingan	44.624.000,00	33.424.000,00	74,90	181.050.000,00
5	Honorium rohaniawan	14.000.000,00	3.600.000,00	25,71	7.100.000,00
6	Honorium tim penyusun jurnal bulletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	91.400.000,00	62.300.000,00	68,16	185.860.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.186.640.000,00	4.135.550.000,00	98,77	62.700.000,00
8	Honorium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	572.400.000,00	535.100.000,00	93,48	559.200.000,00
9	Belanja jasa tenaga pendidikan	28.734.000.000,00	28.673.000.000,00	99,78	23.772.000.000,00
10	Belanja jasa tenaga kesehatan	2.546.088.600,00	2.272.836.963,00	89,26	391.967.000,00

11	Belanja jasa tenaga laboratorium	91.820.000,00	72.933.000,00	79,43	49.528.000,00
12	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	827.174.000,00	812.944.000,00	98,27	664.019.000,00
13	Belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8.337.450.000,00	8.086.475.000,00	96,98	7.648.500.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.490.400.000,00	1.430.900.000,00	96,00	1.341.600.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	682.800.000,00	665.200.000,00	97,42	620.400.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penangan Sosial	1.231.800.000,00	982.350.000,00	79,74	1.207.950.000,00
17	Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan	424.800.000,00	414.540.000,00	97,58	0,00
18	Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	201.500.000,00	200.425.000,00	99,46	0,00
20	Belanja jasa tenaga administrasi	12.671.880.625,00	11.654.146.607,00	91,96	11.831.576.325,00
21	Belanja jasa tenaga operator komputer	9.596.050.000,00	9.231.373.500,00	96,19	9.062.392.500,00
22	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	3.166.200.000,00	3.096.900.000,00	97,81	2.073.100.000,00
23	Belanja jasa tenaga ahli	3.842.400.000,00	3.234.234.575,00	84,17	4.249.980.193,00
24	Belanja jasa tenaga kebersihan	7.089.636.000,00	6.686.455.757,00	94,31	6.593.630.000,00
25	Belanja jasa tenaga keamanan	3.892.468.000,00	3.590.028.000,00	92,23	4.550.725.000,00
26	Belanja jasa tenaga ceraka	34.560.000,00	19.493.260,00	56,40	21.038.920,00
27	Belanja jasa tenaga supir	1.984.736.000,00	1.726.388.000,00	86,98	1.708.972.000,00
28	Belanja jasa tenaga juru masak	285.156.000,00	184.571.875,00	64,72	155.925.000,00
29	Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan Listrik	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	204.000.000,00
30	Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	227.700.000,00	161.800.000,00	71,05	124.000.000,00
31	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	30.000.000,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	143.974.000,00	141.914.500,00	98,56	29.790.200,00
33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
34	Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi	1.024.070.000,00	866.537.750,00	84,61	898.418.404,73
35	Belanja jasa penyelenggaraan acara	3.570.665.000,00	2.995.582.197,00	83,89	4.668.179.622,00